

Evaluasi Kinerja Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Orahili Tumori

Nike Marlina Zebua^{1*}, Delipiter Lase², Fatolosa Hulu³, Suka'aro Waruwu⁴

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias ^{1,2,3,4}

Abstrak

Administrasi pemerintahan desa yang efektif sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditingkat lokal dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah bagian dari sistem pemerintahan yang menjadi tiang utama dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desa. Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor utama, baik internal maupun eksternal, yang berkontribusi terhadap keterlambatan dalam penetapan APBDes di Desa Orahili Tumori. Untuk menganalisis dampak keterlambatan penetapan APBDes terhadap aspek-aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Orahili Tumori, termasuk pengaruhnya terhadap proyek pembangunan, pelayanan publik, dan kepuasan masyarakat. Untuk mengidentifikasi keterlambatan penetapan APBDes mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan di Desa Orahili Tumori. Untuk mengetahui perbedaan persepsi antara pemangku kepentingan terkait penyebab dan dampak keterlambatan penetapan APBDes. Untuk mengidentifikasi Strategi yang efektif untuk mengatasi keterlambatan penetapan APBDes dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan Desa Orahili Tumori. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Kualitatif Kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi Penelitian ini menemukan bahwa Faktor penyebab keterlambatan penetapan APBDES yaitu Sumber daya manusia, regulasi, koordinasi internal. dampak keterlambatan penetapan APBDes yaitu terlambat turunnya DD, terlambatnya pembangunan, dan penyaluran bantuan sosial. terlambatnya penetapan APBDES membuat masyarakat kurang percaya dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan desa mereka menganggap adanya penyalahgunaan wewenang. Strategi yang digunakan yaitu regulasi terlebih dahulu di turunkan ke desa, mengikuti pelatihan, koordinasi dengan instansi terkait Saran dari penelitian ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melakukan komunikasi yang intensif dengan instansi terkait untuk memastikan regulasi turun tepat waktu, penguatan koordinasi internal, meningkatkan tingkat komunikasi dengan masyarakat tentang status proyek dan alasan di balik keterlambatan, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya, dan adakan forum diskusi dan musyawarah rutin dengan masyarakat untuk mendengarkan masukan mereka dan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pemerintahan desa.

Kata Kunci: Evaluasi Kinerja, Administrasi

Abstract

An effective administration of the village government is essential to ensure the implementation of the development, empowerment of the community to realize the well-being of the local level can run well and on time. The Village Revenue and Shopping Budget (APBDes) is part of the

government system that is the main pillar in planning and implementing construction in the village. Therefore, this research aims to identify and analyze the key factors, both internal and external, that contribute to the delay in the establishment of APBDes in Orahili Tumori Village. To analyse the impact of delayed establishing APBdes on the development and well-being aspects of the community in the Orahilli Tumori village, including its impact on development projects, public services, and public satisfaction. To identify delays in establishing the APBD affect the confidence and participation of the public in the governance processes in the Orahili tumori village. The method used in this research is the qualitative method. Data collection techniques in this study are interviews, observations, and documentation. This research found that the factors causing the delay in the establishment of APBDES are Human Resources, regulation, internal coordination. The strategy used is to pre-regulate down to the village, follow training, coordinate with related agencies. The recommendations of this research improve the quality of human resources, conduct intensive communication with relevant agencies to ensure timely down regulation, strengthen internal coordination, improve communication with the public about the status of the project and the reasons behind the delays, as well as the steps taken to address them, and organize forums for discussions and routine discussions with the community to listen to their input and increase their participation in the village governance process.

Keywords: Performance Assessment, Administration

Copyright (c) 2024 Nike Marlina Zebua

✉ Corresponding author :

*Email Address : nikezebuga09@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa merupakan pemerintahan di tingkat lokal yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa pemerintah Desa diberikan kewenangan penuh dalam mengatur urusan rumah tangganya atau disebut dengan otonomi daerah. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan kegiatan pembangunan, dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat desa. Apabila pemerintahan desa berjalan dengan baik maka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud, untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan administrasi pemerintahan desa yang baik. Administrasi pemerintahan desa merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan desa untuk mencapai tujuan pemerintahan, baik dalam menggerakkan partisipasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Administrasi pemerintahan desa adalah aspek penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan di desa (Margherita et al., 2021).

Administrasi dapat diartikan secara sempit dan secara luas, menurut (El Idrissi et al., 2023) bahwa administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan penatausahaan, catat-mencatat, mengetik, menggandakan dan lain sebagainya. Dilihat dalam arti luas administrasi memiliki makna yang mendalam yaitu keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. S.P Siagian (Abdurachman et al., 2023). Dapat diketahui bahwa administrasi adalah upaya untuk mencapai tujuan secara

efektif dan efisien dengan memanfaatkan orang-orang dalam bentuk kerjasama . unsur utama dalam administrasi meliputi tujuan,SDM, sumber daya lain, dan waktu. Dengan kata lain administrasi adalah bagian dari subsistem organisasi dengan unsur-unsur tersebut.

Oleh karena itu, pemerintahan desa perlu administrasi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, tanpa administrasi yang baik pemerintah desa tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Bahwa Administrasi pemerintahan desa meliputi :

1. Administrasi Umum
2. Administrasi Penduduk
3. Administrasi Keuangan
4. Administrasi pembangunan
5. Administrasi lainnya

Administrasi pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat lokal yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Menurut Lutter Gullick dalam (Ren et al., 2023) menyebutkan bahwa fungsi administrasi yaitu Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting sebagai fungsi-fungsi dasar dalam administrasi publik, yang dapat diterapkan dalam administrasi pemerintahan desa. Untuk itu, administrasi pemerintahan desa harus berjalan secara efektif dan efisien. Pemerintah desa sebagai unit pemerintahan paling bawah yang memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat lokal, yang mengurus tata pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta memberdayakan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2016 bahwa Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dan perangkat desa diberikan tugas dibidang administrasi oleh karena itu dibutuhkan perangkat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam melaksanakan tugas serta memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Menurut Djani (2022:3) bahwa administrasi bertujuan untuk kepentingan masyarakat yang tidak terlepas dari unsur adanya tujuan dan sasaran dalam pekerjaan, adanya kerjasama antara sekelompok orang, dan adanya sarana yang digunakan (Carvalho et al., 2019).

Administrasi pemerintahan desa yang efektif sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditingkat lokal dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah bagian dari sistem pemerintahan yang menjadi tiang utama dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desa. Untuk mencapai tujuan atau visi misi pemerintahan desa sangat ditentukan oleh kinerja administrasi pemerintahan Desa. Jika kinerja administrasi pemerintahan desa kurang baik maka untuk mencapai tujuan atau visi misi pun akan terhambat. Salah satu indikator keberhasilan kinerja administrasi pemerintahan desa adalah ketepatan waktu dalam penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) yang menjadi dasar dalam berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah dokumen perencanaan keuangan desa yang disusun oleh pemerintah desa untuk satu tahun anggaran yang mencakup rencana penerimaan dan pengeluaran yang akan

dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan, pelayanan serta pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, APBDes harus ditetapkan tepat waktu selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penetapan APBDes yang tepat waktu sangat penting untuk memastikan kelancaran program/kegiatan pembangunan, pelayanan serta pemberdayaan masyarakat. APBDes berfungsi sebagai instrumen penting yang memastikan alokasi dana yang tepat waktu dan akurat untuk mendukung program-program pembangunan desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018). Keberhasilan dalam implementasi program-program ini sangat tergantung pada kesiapan administratif dalam penetapan APBDes. Jika APBDes terlambat ditetapkan maka segala program atau kegiatan di Desa akan terhambat seperti terlambatnya pencairan dana desa yang mengakibatkan segala kegiatan di desa tidak dapat dilaksanakan (Farooq et al., 2022). Untuk itu, kinerja administrasi pemerintahan desa dituntut harus mampu beroperasi secara efisien dan efektif agar segala kegiatan di tingkat desa dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zakia Darojad yang diPublikasikan pada tahun 2021 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terkait judul Identifikasi Faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 (Pasca Undang-Undang Nomor 6 Thun 2014 Tentang Desa). Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penetapan APBDes serta dampak dari keterlambatan penetapan APBDes di Desa Tisnogambar. Berdasarkan penilitian yang dilakukan bahwa faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 yaitu: Kualitas sumber daya manusia, kurangnya kelengkapan fasilitas di kantor Desa Tisnogambar, penetapan perbup ditetapkan setelah tahun anggaran. Keterlambatan dalam penetapan APBDes memberikan pengaruh negatif yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa sehingga segala program kegiatan di desa terhambat.

Selanjutnya berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bambang Udiono yang dipublikasikan pada tahun 2021 Universita Slamet Riyadi Surakarta-UNISRI terkait judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penelitian ini membahas tentang Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penetapan APBDes. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa ada lima (5) faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penetapan APBdes yaitu: 1. Proses kesepakatan kepala desa dan BPD, 2. Koordinasi yang tidak baik antara sekdes dan perangkat desa, 3. Perangkat desa kurang memahami tupoksi, 4. Sarana yang belum memadai, 5. Petunjuk teknis yang sering berubah.

Kemudian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septika Linda Wati yang dipublikasikan pada tahun 2017 Universitas Diponegoro Semarang terkait judul Foktor-Faktor Yang Melatar Belakang Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Blora Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlambatan penetapan APBD di Kabupaten Blora. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat lima (5) faktor yang melatar belakang keterlambatan pentapan APBD diantaranya: 1. faktor komitmen eksekutif

dan legislatif dalam mentaati jadwal penyusunan APBD, 2. Faktor komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, 3. Kurang maksimal dalam menjalankan fungsi peganggaran keuangan daerah, 4. Faktor MSDM dan faktor politik, 5. Faktor birokrasi dan masalah teknis. Keterlambatan penetapan APBD di Kabupaten Blera mengakibatkan program pembangunan infrastruktur dan proyek energi mandiri pedesaan tidak dapat dilaksanakan.

Kinerja administrasi pemerintahan desa menjadi faktor kunci yang berkontribusi dalam penetapan APBDes. Manajemen sumber daya manusia merupakan faktor penting yang mempengaruhi kinerja administrasi pemerintahan desa. menurut Gauzali dalam (Schuh et al., 2019) MSDM merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan organisasi, agar pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), dan keterampilan (*skill*) mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan, administrasi pemerintahan desa yang efektif menjadi kunci keberhasilan pembangunan di tingkat lokal. APBDes berfungsi sebagai instrumen penting yang memastikan alokasi dana yang tepat waktu dan akurat untuk mendukung program-program pembangunan desa. Keberhasilan dalam implementasi program-program ini sangat tergantung pada kesiapan administratif dalam penetapan APBDes.

Namun, pada kenyataannya masih banyak desa yang mengalami keterlambatan dalam penetapan APBDes yang menyebabkan segala kegiatan di desa terhambat baik program pembangunan maupun pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sama dengan desa yang lainnya desa Orahili Tumori juga memiliki tantangan atau permasalahan dalam menjalankan roda pemerintahannya dari tahun ke tahun mengalami keterlambatan dalam penetapan APBDes yang mengakibatkan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terhambat. Desa Orahili Tumori menjadi salah satu lokus penelitian di antara banyaknya Desa di Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli yang memiliki keanekaragaman penduduk serta potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pembangunan.

Dalam hal ini evaluasi kinerja administrasi pemerintahan desa menjadi kebutuhan utama untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab keterlambatan penetapan APBDes yang perlu diteliti dan dianalisis. Menurut Bambang Wahyudi (dalam Rismawati & Mattala, 2018:7) evaluasi kinerja adalah suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis untuk menilai prestasi tenaga kerja atas pekerjaan yang diberikan termasuk potensi pengembangannya. Pemerintah desa bertugas sebagai administrator penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pemerintah desa dan perangkat desa harus benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa. Adapun perencanaan APBdes di Desa Orahili Tumori meliputi :

1. Penggalian usulan dusun
2. Musyawarah desa (MUSDES)
3. Penetapan rencana kerja pemerintahan desa
4. Penyusunan dokumen APBDes
5. Verifikasi dan evaluasi dokumen APBDes
6. Musyawarah penetapan APBDes
7. Pelaksanaan kegiatan

Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa keterlambatan penetapan APBDes disebabkan oleh kurangnya keterampilan dan pengetahuan staf desa dalam mengelola keuangan, pengolahan data, dan pemahaman mereka terhadap regulasi

yang relevan. Terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kemampuan administratif staf, yang berperan penting dalam proses penetapan APBDes. Terdapat konflik internal di tingkat pemahaman desa yang dapat menghambat kesepakatan bersama terkait alokasi anggaran. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan APBDes juga sangat penting. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dapat menyebabkan proses penetapan APBDes tidak mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat secara memadai, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam persetujuan. Kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap regulasi dan prosedur yang berkaitan dengan penetapan APBDes juga menjadi penyebab keterlambatan. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya desa untuk selalu menyiapkan diri terhadap perubahan kebijakan atau regulasi.

Oleh karena itu, keterlambatan dalam penetapan APBDes menjadi tantangan yang sangat serius yang dapat menghambat proses pembangunan di Desa. Dampak dari keterlambatan tersebut melibatkan berbagai aspek negatif, terutama terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan. Proyek-proyek tersebut akan terhambat dan mengalami keterlambatan pelaksanaan, menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja administrasi pemerintahan Desa di Desa Orahili Tumori dengan fokus pada keterlambatan penetapan APBDes. Evaluasi ini tidak hanya pada identifikasi masalah dan tantangan tetapi juga pada pengembangan solusi praktis dan strategi perbaikan untuk meningkatkan kualitas administrasi dan pemerintahan desa. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa administrasi desa dapat berfungsi secara efektif dan efisien, memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti "EVALUASI KINERJA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI DESA ORAHILI TUMORI".

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang menurut Sugiyono dalam (Ren et al., 2023), bertujuan untuk mengetahui nilai variabel secara mandiri tanpa membandingkan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian deskriptif kualitatif, di mana data yang digunakan cenderung berupa narasi dan observasi. Penelitian ini difokuskan pada pelatihan kerja sebagai variabel tunggal, dengan indikator meliputi reaksi pelatihan, hasil pembelajaran, dampak organisasional, dan perubahan kebiasaan.

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama, melakukan observasi langsung, wawancara mendalam, dan mengumpulkan data dari dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai pelatihan kerja di perusahaan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mencatat aktivitas yang terjadi selama pelatihan kerja, wawancara dilakukan dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi mendalam, sedangkan dokumentasi melibatkan pengumpulan bukti tertulis, foto, dan rekaman sebagai data pendukung.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep Miles and Huberman yang melibatkan tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memilih data yang relevan untuk memudahkan pengolahan selanjutnya. Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, atau pictogram untuk memvisualisasikan pola

hubungan antar data. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus sampai data yang dikumpulkan mencapai kejenuhan, dengan kesimpulan yang ditarik menjadi kredibel setelah didukung oleh bukti-bukti yang valid (Sheng et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil temuan peneliti keterlambatan penetapan APBDes di Desa Orahili dipengaruhi oleh faktor-faktor kualitas sumber daya manusia kurangnya kemauan dan rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan, masih kurangnya kemampuan perangkat desa dalam membuat dokumen ABPDes sehingga sering kali adanya revisi, kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan BPD dalam menyepakati pelaksanaan musyawarah desa. ketidak pastian dan keterlambatan regulasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Serta kurangnya kemampuan sekretaris desa dalam mengkoordinasikan pembuatan dokumenn APBDes, memverifikasi dokumen, penyesuain regulasi, dan penyusunan tata naskah (Schuh et al., 2019).

Keterlambatan penetapan APBDes berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan seperti jalan, drainase, jembatan, dan bantuan sosila terlambat di laksanakan. Kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap pemerintah desa menurun karena keterlambatan pelaksanaan kegiatan di desa. Namun, setelah ada komunikasi dan informasi dari pemerintah desa maka partisipasi masyarakat meningkat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan desa. Terkait keterlambatan penetapan APBDes tidak ada perbedaan persepsi yang signifikan antara pemangku kepentingan (Spagnoletti et al., 2022). Karena semua rencana kegiatan dan anggaran disesuaikan dengan regulasi atau aturan yang berlaku sehingga perbedaan pendapat atau pandangan tidak mempengaruhi proses penetapan APBDes.

Strategi yang efektif untuk mengatasi keterlambatan penetapan dokumen APBDes yaitu regulasi terlebih dahulu diturunkan ke desa baru setelah itu diadakan musyawarah desa sehingga kegiatan dan anggaran yang digunakan dapat disesuaikan. Strategi yang telah dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan efisiensi administrasi, pemerintah desa mengikuti pelatiba-pelatihan baik di dalam daerah maupun di luar daerah, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan meminta bantu kepada pendamping desa dan tenaga ahli agar dokumen APBDes secepatnya ditetapkan (Margherita et al., 2021). Akuntabilitas dan transparansi dokumen APBDes pemerintah desa melakukan penggalian usulan lewat musyawarah desa, membuat informasi di papan informasi di setiap dusun, membuat baliho APBDes, dan berencana membuat informasi lewat website desa dan wa grup.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zakia Darojad (2021) bahwafaktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 yaitu: Kualitas sumber daya manusia, kurangnya kelengkapan fasilitas di kantor desa tisnogambar, penetapan perbup ditetapkan setelah tahun anggaran. Keterlambatan dalam penetapan APBDes memberikan pengaruh negatif yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa sehingga segala program kegiatan di desa terhambat. Oleh karena itu hasil penelitian yang dilakukan peneliti akan dipaparkan sebagai berikut:

Apa faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBDes?

Berdasarkan hasil penelitian dengan pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi maka, pada Desa Orahili Tumori terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan teori menurut (Farooq et al., 2022) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan (administrasi) yaitu:

a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas sumber daya manusia sangat berperan penting dalam keterlambatan penetapan APBDes di Desa Orahili Tumori. Rendahnya kemauan dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan, perangkat desa yang masih kurang mumpuni dan belum memiliki keterampilan teknis yang memadai sehingga dokumen sering kali harus direvisi, serta kurangnya komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah desa dengan BPD dalam mencapai kesepakatan pelaksanaan musyawarah yang menyebabkan pelaksanaan musyawarah terlambat dilaksanakan yang menghambat proses penetapan APBDes di Desa Orahili Tumori.

b. Regulasi

Terlambat turunnya regulasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah kota menghambat proses penetapan dokumen APBDes. Regulasi ini sebagai pedoman dalam penyusunan kegiatan dan pedoman batas penggunaan anggaran dalam melaksanakan segala kegiatan di desa. Keterlambatan penetapan dokumen APBDes di Desa Orahili Tumori juga disebabkan oleh ketidakpastian dan keterlambatan regulasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan masalah administrasi yaitu verifikasi yang lama dari kecamatan. Regulasi yang turun setelah musyawarah desa menyebabkan ketidaksesuaian antara kegiatan dan anggaran yang telah direncanakan dengan aturan yang berlaku sehingga harus disesuaikan kembali yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBDes.

c. Koordinasi internal

Koordinasi antara perangkat desa di Desa Orahili Tumori masih minim, kemampuan sekretaris desa mengkoordinasikan pembuatan dokumen APBDes belum optimal adanya pelimpahan wewenang antara sesama perangkat desa. Sekretaris desa yang bertanggungjawab dalam memverifikasi dokumen, penyesuaian regulasi, penyusunan tata naskah, belum sepenuhnya menjalankan tugas yang diembannya. Adanya masalah koordinasi internal menghambat proses penetapan dokumen APBDes.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bambang Udiono (2021) bahwa ada lima (5) faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penetapan APBDes yaitu: 1. Proses kesepakatan kepala desa dan BPD, 2. Koordinasi yang tidak baik antara sekdes dan perangkat desa, 3. Perangkat desa kurang memahami tupoksi, 4. Sarana yang belum memadai, 5. Petunjuk teknis yang sering berubah.

Apa dampak keterlambatan penetapan APBDes terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

Keterlambatan penetapan APBDes berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Orahili Tumori. Dokumen APBDes sebagai pedoman dalam melaksanakan segala kegiatan di Desa, dokumen APBDes yang terlambat di tetapkan tentunya dana desa (DD) akan terlambat, pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan baik itu pembangunan jalan, jembatan, drainase dan pembangunan lainnya mengalami penundaan. Keterlambatan penetapan APBDes menghambat penyaluran bantuan sosial baik bantuan langsung tunai (BLT)

dan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk penanganan stunting dan gizi kurang sehingga kesejahteraan masyarakat menurun dan penanganan kesehatan masyarakat tidak dapat dilakukan tepat waktu. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Septika Linda wati (2017) faktor yang melatar belakangi keterlambatan penetapan APBD diantaranya: 1. faktor komitmen eksekutif dan legislatif dalam mentaati jadwal penyusunan APBD, 2. Faktor komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, 3. Kurang maksimal dalam menjalankan fungsi peganggaran keuangan daerah, 4. Faktor MSDM dan faktor politik, 5. Faktor birokrasi dan masalah teknis. Keterlambatan penetapan APBDes mengakibatkan program pembangunan infrastruktur dan proyek energi mandiri pedesaan tidak dapat dilaksanakan.

Bagaimana keterlambatan penetapan APBDes mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan di desa orahili tumori?

Menurut (AlSuwaidi et al., 2021) kepercayaan masyarakat terjadi apabila masyarakat menilai pemerintah dan para pemimpin mampu melaksanakan apa yang telah dijanjikan secara efisien, adil, dan jujur. Menurut Sumaryadi dalam (Alamsjah, 2022) partisipasi merupakan peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik itu pernyataan, masukan, tenaga, waktu, keahlian, dan modal. Keterlambatan penetapan APBDes di Desa Orahili Tumori berpengaruh pada kepercayaan dan partisipasi masyarakat menurun. Pada umumnya masyarakat tidak memahami proses administrasi tentang dokumen APBDes, masyarakat hanya tau kegiatan yang dilaksanakan di desa terlaksana tepat waktu. Keterlambatan pembangunan infrastruktur dan penyaluran bantuan sosial membuat masyarakat kurang percaya dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan desa mereka menganggap adanya penyalahgunaan wewenang. Namun, setelah ada komunikasi dan informasi dari pemerintah desa maka partisipasi masyarakat meningkat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan desa.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Spagnoletti et al., 2022) faktor penghambat dalam proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat desa kepada pemerintahan desa serta rendahnya swadaya masyarakat desa, rendahnya swadaya masyarakat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih kurang.

Apa perbedaan persepsi antara pemangku kepentingan yang menjadi penyebab dan dampak keterlambatan penetapan APBDes?

Perbedaan persepsi adalah situasi dimana individu atau kelompok memiliki pandangan yang berbeda mengenai suatu masalah, informasi, ataupun situasi. Di Desa Orahili Tumori terkait keterlambatan penetapan APBDes tidak ada perbedaan persepsi yang signifikan antara pemangku kepentingan. Karena semua rencana kegiatan dan anggaran disesuaikan dengan regulasi atau aturan yang berlaku sehingga perbedaan pendapat atau pandangan tidak mempengaruhi proses penetapan APBDes.

Strategi apa yang efektif untuk mengatasi keterlambatan penetapan APBDes dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan Desa Orahili Tumori?

Menurut Chandler (dalam Timpal et all., 2021:3) strategi merupakan penentuan tujuan dan sasaran panjang organisasi melalui aksi dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di desa orahili tumori strategi yang efektif

untuk mengatasi keterlambatan penetapan dokumen APBDes yaitu regulasi terlebih dahulu diturunkan ke desa baru setelah itu diadakan musyawarah desa sehingga kegiatan dan anggaran yang digunakan dapat disesuaikan. Strategi yang dilakukan pemerintah desa orahili tumori untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah desa mengikuti pelatihan-pelatihan baik di dalam daerah maupun di luar daerah, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan meminta bantu kepada pendamping desa dan tenaga ahli agar dokumen APBDes secepatnya ditetapkan. Akuntabilitas dan transparansi dokumen APBDes pemerintah desa melakukan penggalian usulan lewat musyawarah desa, membuat informasi di papan informasi disetiap dusun, membuat balihho APBDes, dan berencana membuat informasi lewat website desa dan wa grup.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Savitri et all, (2019) faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyusunan APBD yaitu perda pembentukan APBD belum ditetapkan, keterlambatan dana bagi hasil dari provinsi, kualitas rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana strategis yang belum optimal, adanya intervensi pada proses penyusunan, koordinasi antara SKPD masih lemah, SDM yang kurang kompeten, faktor team work dan komitmen. Keterlambatan penetapan APBD berdampak pada keterlambatan dana transfer ke desa, terlambatnya pembayaran gaji pegawai, dan manfaat yang diterima masyarakat tertunda seperti program kegiatan di desa terlambat dilaksanakan. Strategi yang dilakukan yaitu melakukan inovasi-inovasi dalam proses perencanaan partisipatif yang sedemikian rupa sehingga aspirasi terserap dalam dokumen perencanaan, pengembangan strategi berupa dialog ataupun sosialisasi mengenai perencanaan, penguatan kapasitas dan komitmen, dan pemberian sanksi.

Penelitian ini Mengevaluasi Kinerja Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Orahili Tumori dengan fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBDes, dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pengaruhnya pada kepercayaan dan partisipasi masyarakat, serta strategi efektif untuk mengatasi keterlambatan tersebut. Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi yang penting bagi peningkatan kinerja administrasi pemerintahan Desa di Desa Orahili Tumori mencakup kualitas sumber daya manusia yang rendah mempengaruhi banyak aspek administrasi pemerintahan desa, termasuk penetapan APBDes. Pemerintah desa perlu fokus pada pelatihan dan pengembangan keterampilan perangkat desa agar mereka lebih kompeten dalam menjalankan tugas yang telah dipercayakan. Pelatihan teknis dan manajerial yang rutin dapat meningkatkan kemampuan dan efisiensi kerja perangkat desa. Terlambatnya regulasi dari pemerintah pusat dan daerah merupakan hambatan yang signifikan dalam proses penetapan APBDes. Implikasi ini menyoroti pentingnya pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat turunnya regulasi ke desa dan memberikan kepastian waktu agar desa dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai jadwal. Proses verifikasi administrasi oleh kecamatan juga perlu ditingkatkan agar lebih cepat dan efisien.

Kurangnya koordinasi internal di antara perangkat desa menyebabkan penundaan dan ketidakefisienan administrasi. Pemerintah desa perlu mengembangkan mekanisme koordinasi yang lebih baik, termasuk pelimpahan wewenang yang jelas dan efisien agar pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat desa sehingga pekerjaan tidak tertumpu pada satu atau beberapa individu saja. Peningkatan kemampuan sekretaris desa

dalam mengoordinasi tugas-tugas administratif juga sangat penting. Keterlambatan penetapan APBDes berdampak langsung pada keterlambatan proyek pembangunan infrastruktur dan penyaluran bantuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan dalam proses administrasi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan dan program kesejahteraan masyarakat dapat berjalan tepat waktu (Abbas et al., 2022).

Penundaan dalam pelaksanaan proyek dan penyaluran bantuan sosial akibat keterlambatan APBDes menurunkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat kepada pemerintahan desa. Pemerintah desa harus meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan masyarakat untuk mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi mereka. Penggunaan papan informasi, baliho, website desa, dan grup WhatsApp dapat membantu dalam menyebarkan informasi yang diperlukan. Strategi yang efektif termasuk memastikan regulasi turun terlebih dahulu sebelum musyawarah desa, meningkatkan pelatihan administrasi, dan melakukan koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait. Pendampingan dari tenaga ahli dan pendamping desa juga dapat membantu dalam mempercepat penetapan dokumen APBDes. Akuntabilitas dan transparansi harus menjadi prioritas dalam administrasi pemerintahan desa untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada bab IV yang telah dilakukan peneliti untuk mengavaluasi kinerja administrasi pemerintahan desa di desa orahili tumori yang berfokus pada keterlambatan penetapan APBDes maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBDes di Desa Orahili Tumori yaitu: a) kualitas sumber daya manusia, Perangkat desa sering kali kurang memiliki kemauan dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan, serta keterampilan teknis yang memadai. Hal ini menyebabkan dokumen sering kali harus direvisi, dan kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dengan BPD memperlambat pelaksanaan musyawarah, yang berdampak pada proses penetapan APBDes. b) Terlambat turunnya regulasi dari pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kendala utama. Regulasi yang turun setelah musyawarah desa mengakibatkan ketidaksesuaian antara kegiatan dan anggaran yang telah direncanakan dengan aturan yang berlaku, sehingga perlu penyesuaian kembali yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBDes. Selain itu, verifikasi yang lama dari kecamatan juga menambah hambatan dalam proses administrasi. c) Kurangnya koordinasi internal antar perangkat desa, termasuk pelimpahan wewenang yang kurang efektif, turut menghambat penetapan APBDes. Sekretaris desa yang bertanggung jawab dalam memverifikasi dokumen, penyesuaian regulasi, dan penyusunan tata naskah belum sepenuhnya menjalankan tugas dengan optimal.

Dampak keterlambatan penetapan APBDes terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, Keterlambatan penetapan APBDes berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Orahili Tumori. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan drainase tertunda, serta penyaluran bantuan sosial seperti BLT dan PMT untuk penanganan stunting dan gizi kurang menjadi terlambat, yang pada akhirnya menurunkan kesejahteraan masyarakat dan penanganan kesehatan masyarakat.

Selain itu, keterlambatan penetapan APBDes juga mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan di desa. Masyarakat yang tidak memahami proses administrasi menganggap adanya penyalahgunaan wewenang, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah desa menurun. Namun, setelah adanya komunikasi dan informasi yang jelas dari pemerintah desa, partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan desa meningkat.

Perbedaan persepsi antara pemangku kepentingan yang menjadi penyebab dan dampak keterlambatan penetapan APBDes, Tidak ada perbedaan persepsi yang signifikan antara pemangku kepentingan terkait keterlambatan penetapan APBDes, karena semua rencana kegiatan dan anggaran disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Strategi efektif untuk mengatasi keterlambatan penetapan APBDes meliputi regulasi terlebih dahulu diturunkan ke desa sebelum musyawarah desa dilaksanakan, strategi yang dilakukan pemerintah desa orahili tumori untuk meningkatkan efisiensi administrasi yaitu mengikuti pelatihan dan koordinasi dengan instansi terkait, serta meminta bantuan pendamping desa dan tenaga ahli. Transparansi dan akuntabilitas juga ditingkatkan melalui penggalan usulan lewat musyawarah desa, penyebaran informasi melalui papan informasi di setiap dusun, baliho APBDes, dan perencanaan pembuatan website desa serta grup WhatsApp.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menulis artikel ini hingga terbit. Semoga artikel ini menjadi berkat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Referensi:

- Abbas, Z., Sarwar, S., Rehman, M. A., Zámečník, R., & Shoaib, M. (2022). Green HRM promotes higher education sustainability: a mediated-moderated analysis. *International Journal of Manpower*, 43(3), 827-843. <https://doi.org/10.1108/IJM-04-2020-0171>
- Abdurachman, D., Ramdhan, R. M., Karsoma, A., Winarno, A., & Hermana, D. (2023). Integrating Leadership in Job Demand Resources (JD-R) for Personal Performance in Military Institution. *Sustainability (Switzerland)*, 15(5), 1-13. <https://doi.org/10.3390/su15054004>
- Alamsjah, F. (2022). *GLOBAL BUSINESS & FINANCE REVIEW Ambidextrous Leadership of Publicly Listed Companies during Turbulent Times: The Importance of Agility and Alliance Capability*. 3(June), 41-55.
- AlSuwaidi, M., Eid, R., & Agag, G. (2021). Understanding the link between CSR and employee green behaviour. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 46(October 2020), 50-61. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.11.008>
- Carvalho, A. M., Sampaio, P., Rebentisch, E., Carvalho, J. Á., & Saraiva, P. (2019). Operational excellence, organisational culture and agility: the missing link? *Total Quality Management and Business Excellence*, 30(13-14), 1495-1514. <https://doi.org/10.1080/14783363.2017.1374833>
- El Idrissi, M., El Manzani, Y., Ahl Maatalah, W., & Lissaneddine, Z. (2023). Organizational crisis preparedness during the COVID-19 pandemic: an investigation of dynamic capabilities and organizational agility roles. *International Journal of Organizational Analysis*, 31(1), 27-49. <https://doi.org/10.1108/IJOA-09-2021-2973>
- Farooq, K., Yusliza, M. Y., Muhammad, Z., & Mat, N. H. N. (2022). Make it their Decisions, not your Directives: Exploring Required Green Competencies for Employee Ecological Behaviour. *Organizacija*, 55(2), 128-141. <https://doi.org/10.2478/orga-2022-0009>
- Margherita, A., Sharifi, H., & Caforio, A. (2021). A conceptual framework of strategy, action

- and performance dimensions of organisational agility development. *Technology Analysis and Strategic Management*, 33(7), 829–842. <https://doi.org/10.1080/09537325.2020.1849611>
- Ren, S., Tang, G., & Zhang, S. (2023). Small Actions Can Make a Big Difference: Voluntary Employee Green Behaviour at Work and Affective Commitment to the Organization. *British Journal of Management*, 34(1), 72–90. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12597>
- Schuh, G., Prote, J. P., Gützlaff, A., Ays, J., & Donner, A. (2019). Fixed cost management as an enabler for agile manufacturing networks. *Procedia Manufacturing*, 39(2019), 625–634. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.01.435>
- Sheng, H., Feng, T., Chen, L., & Chu, D. (2022). Operational coordination and mass customization capability: the double-edged sword effect of customer need diversity. *International Journal of Logistics Management*, 33(1), 289–310. <https://doi.org/10.1108/IJLM-11-2020-0417>
- Spagnoletti, P., Kazemargi, N., & Prencipe, A. (2022). Agile Practices and Organizational Agility in Software Ecosystems. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 69(6), 3604–3617. <https://doi.org/10.1109/TEM.2021.3110105>